

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN FISIK PADA PROYEK PNPM MANDIRI DI KOTA AMBON

Lenora Leuhery (en_lenny@yahoo.co.id)
Dosen pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon¹⁾

ABSTRAK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan yang telah dilaksanakan di Kota Ambon sejak tahun 2007, diyakini telah memberikan kontribusi besar bagi pemerintah kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun salah satu permasalahan yang banyak terjadi di lapangan adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik pada PNPM Mandiri Perkotaan Kota Ambon, yang berdampak pada tidak optimalnya hasil pekerjaan dan menghambat proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terutama dalam hal penyelesaian pekerjaan fisik PNPM Mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik pada proyek PNPM Mandiri perkotaan di kota Ambon. Analisis dilakukan terhadap kuesioner responden yang terwakili dari semua pihak yang terlibat pada proyek PNPM Mandiri Perkotaan yaitu pemberi pekerjaan/pemerintah (pemilik), pelaksana pekerjaan/masyarakat langsung (KSM) dan pihak pelaksana pengawas pekerjaan/koodinator pekerjaan (BKM). Dengan menggunakan program SPSS dilakukan pengolahan data dan disimpulkan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik adalah Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5), pada indikator pelaporan pekerjaan yang lambat dan tidak lengkap, dengan prosentasi nilai kesetujuan skala intensitas dan skala menentukan masing-masing adalah: skala intensitas (BKM 93%; KSM 97%; Pemilik 95%) dan skala menentukan (BKM 96%; KSM 98%; Pemilik 96%)

Kata Kunci : keterlambatan pekerjaan, kesetujuan, intensitas, skala menentukan

ABSTRACT

National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri) that have been implemented in the city of Ambon since 2007, is believed to have contributed greatly to the city government in reducing poverty and improving social welfare. But one of the problems that a lot happening in the field is the delay in the completion of physical work on PNPM Urban city of Ambon, which is not optimal impact on the work and impeding the implementation of PNPM Mandiri, especially in terms of physical work completion PNPM Mandiri.

This study aims to analyze the factors that cause delays in the completion of the physical work on the project in the city of Ambon PNPM Mandiri. The analysis was performed on the questionnaire respondents were represented from all parties involved in the project, namely PNPM employer / government (the owner), executing the work / community directly (KSM) and the executive supervisor jobs / employment coordinator (BKM). Performed with SPSS data processing and concluded that the factors that influence the occurrence of delays in completion of the work is the physical aspect Inspection Systems, Control and Evaluation of Work (X5), reporting on the indicators work slow and incomplete, with the percentage of agreement value of the intensity scale and the scale of determine respectively are: intensity scale (BKM 93%; KSM 97%; owners 95%) and determine the scale (BKM 96%; KSM 98%, owner 96%)

¹⁾ Mata kuliah utama yang diajarkan adalah Manajemen Konstruksi. Bidang penelitian yang ditekuni adalah Manajemen Waktu Pelaksanaan Proyek

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan.

Kota Ambon sebagai ibukota provinsi Maluku yang melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 pada 5 kecamatan memiliki berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaannya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk keswadayaan masyarakat/KSM dan BKM sebagai kontrol pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang banyak terjadi di lapangan adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik pada PNPM Mandiri Perkotaan Kota Ambon, yang menjadi penyebab tidak optimalnya hasil pekerjaan dan menghambat proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terutama dalam hal penyelesaian pekerjaan fisik PNPM Mandiri.

Keterlambatan menyebabkan kerugian bagi pemilik/pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan sebagai pihak-pihak terkait, karena umumnya disertai konflik, tuntutan waktu dan biaya, serta penyimpangan kualitas penyelesaian proyek (Saleh, 2005). Seringkali penyebab keterlambatan penyelesaian proyek pada pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon tidak diketahui secara jelas dan rinci. Hal inilah yang mendorong upaya untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon.

KAJIAN TEORI

Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek. Proyek konstruksi dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau *deriverable* yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1998). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.

Setiap proyek mempunyai tujuan khusus, misalnya membangun rumah tinggal, gedung, jembatan dan lainnya. Di dalam proses tersebut, ada batasan yang harus dipenuhi yaitu :

- Biaya (anggaran) proyek, tidak melebihi batas yang telah direncanakan atau telah disepakati sebelumnya atau sesuai dengan kontrak suatu pelaksanaan pekerjaan.
- Mutu pekerjaan, mutu hasil akhir pekerjaan dan proses/cara pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan kesepakatan, perencanaan, ataupun dokumen kontrak pekerjaan.
- Waktu penyelesaian pekerjaan, harus memenuhi batas waktu yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan atau dokumen kontrak pekerjaan yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yaitu :

1. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
2. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
3. Jasa Perencana Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
4. Jasa Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengertian Dasar Keterlambatan

Keterlambatan proyek (*construction delay*) diartikan sebagai penundaan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak kerja dimana secara hukum melibatkan beberapa situasi yang menyebabkan

timbulnya klaim. Keterlambatan proyek timbul ketika kontraktor tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang tercantum dalam kontrak. Waktu kontrak (*Contract time*) merupakan maksimum waktu yang diperlukan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak (Wijyanthi, 2005).

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Keterlambatan proyek adalah termasuk dalam cidera janji. Cidera janji memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan (UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

Dalam pekerjaan konstruksi, penundaan bisa digambarkan sebagai kelebihan waktu baik di luar tanggal kontrak maupun di luar tanggal ketika disetujui untuk penyerahan dari suatu proyek.

Keterlambatan dapat terjadi secara keseluruhan dari kegiatan pelaksanaan konstruksi berdasarkan batas waktu dalam kontrak maupun keterlambatan penyelesaian kegiatan selama/dalam proses pelaksanaan proyek.

Penyebab Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek

Dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi, ada banyak hal dapat membuat pelaksanaan proyek mengalami gangguan sehingga berakibat terjadi keterlambatan waktu penyelesaian.

Menurut Proboyo (1998), penyebab keterlambatan proyek konstruksi diantaranya kesulitan memperoleh bahan konstruksi, kesulitan kontraktor menerima pembayaran bulanan, kesulitan finansial kontraktor, kekurangan dalam organisasi kontraktor, kekurangan dalam organisasi pemlik, kelangkaan pekerja yang bermutu, pekerjaan tambah dalam jumlah besar, kelangkaan personil teknis, keterlambatan pekerjaan desain, kesalahan perencanaan dan penjadwalan, inspeksi lokasi pekerjaan yang tidak memadai, sering terjadi perubahan pekerjaan, kekurangan dalam alokasi peralatan, durasi kontrak yang tidak realistis oleh pemilik, kesulitan memperoleh bahan bakar, ketidaksepakatan pasal-pasal kontrak, kesulitan memperoleh ijin konstruksi, kondisi cuaca yang tidak terduga, ketidaksepakatan terhadap spesifikasi, kesulitan transportasi, kejadian alam yang tidak terduga (gempa bumi, banjir, dan lain-lain), kejadian sosial yang tak terduga dan lain-lain.

Menurut Arain dan Assaf (1998), ada 20 faktor diidentifikasi dapat menyebabkan keterlambatan pada tahap pelaksanaan/konstruksi, yakni : pengetahuan yang kurang terhadap material dan peralatan, rencana dan spesifikasi yang tidak lengkap, detail gambar tidak lengkap, hambatan komunikasi antara kontraktor dan perencana, perintah yang tidak jelas antara kontraktor dan perencana, perencanaan dengan teknologi baru yang tidak dikuasai kontraktor, detail desain kurang jelas, manajer yang tidak berpengalaman, perubahan material yang digunakan, kehabisan material, kesalahan desain, keterlambatan perantara, persetujuan material yang lama, koordinasi yang tidak baik, kesalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan, kesalahan penempatan tenaga terampil, perencana salah memberi intruksi pelaksanaan, kontraktor salah mengartikan rencana detail dan spesifikasi, pelaksanaan tidak sesuai desain, kontraktor tidak menguasai teknologi baru.

Pengkajian Jenis Penyebab Keterlambatan

Didalam proses manajemen pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, berbagai jenis keterlambatan proyek diklasifikasikan dalam 6 aspek kajian yakni :

1. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan
2. Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan
3. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi

4. Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
5. Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
6. Aspek *Force Majeure*

Untuk mendapatkan kejelasan peran masing-masing faktor sebagai penyebab keterlambatan, berikut diberikan kajian singkat tentang penyebab-penyebab keterlambatan tersebut.

Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan

Indikator dari Aspek perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yaitu :

- 1) Jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik. Jadwal yang tidak realistis/ ketat, jarang sekali dapat digunakan untuk melaksanakan proyek dengan sukses (Proboyo, 1998).
- 2) Identifikasi Jenis Pekerjaan, Rencana Urutan Kerja dan Penentuan Durasi yang Tidak Saksama dan tersusun Baik
- 3) Perubahan/pergantian rencana kerja pemilik(Saleh, 2005).
- 4) Metode konstruksi/pelaksanaan yang salah/tidak tepat.

Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan

Indikator dari Aspek lingkup dan dokumen pekerjaan akan ditinjau berdasarkan:

- 1) Perencanaan (Gambar/Spesifikasi) yang Salah/Tidak Lengkap (Saleh, 2005).
- 2) Perubahan Desain/Detail Pekerjaan pada Waktu Pelaksanaan
- 3) Perubahan Lingkup Pekerjaan pada Waktu Pelaksanaan.(Proboyo, 1998).
- 4) Pekerjaan Tambah Dalam Jumlah Besar (Proboyo, 1998).
- 5) Permintaan Perubahan atas Pekerjaan yang Telah Selesai (Proboyo, 1998).

Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi

Indikator dari Aspek sistem organisasi, koordinasi dan yaitu :

- 1) Wewenang dan Kualifikasi Personil Pemilik dalam Mengambil Keputusan (Proboyo, 1998).
- 2) Kurangnya Pengalaman dari Personil dan Manajer Proyek (Saleh, 2005).
- 3) Keterlambatan Penyediaan Alat/Bahan oleh Pemilik (Saleh, 2005).
- 4) Koordinasi dan Komunikasi yang Buruk dalam Organisasi Kontraktor.
- 5) Terjadinya Kecelakaan Kerja.

Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya

Indikator dari Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya yaitu :

- 1) Mobilisasi Sumber Daya yang Lambat atau mempersulit ruang gerak pemindahan bahan dan alat tersebut (Proboyo, 1998).
- 2) Transportasi ke Lokasi Proyek yang Sulit.

- 3) Kurangnya Keahlian dan Ketrampilan Kerja Para Pekerja di Lokasi Proyek Jenis dan intensitas kegiatan proyek (Soeharto, 1997).
- 4) Penyediaan Sumber Daya (Bahan, Alat, (Arain dan Assaf, 1998).
- 5) Kesulitan Pendanaan/Keuangan pada Kontraktor (Proboyo, 1998).

Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan

Aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan akan ditinjau berdasarkan:

- 1) Permintaan, Pengajuan dan Persetujuan Contoh Bahan (Soeharto, 1997).
- 2) Persetujuan Ijin Kerja.
- 3) Kegagalan Kontraktor Melaksanakan Pekerjaan.
- 4) Banyak Hasil Pekerjaan yang Harus Diperbaiki/Diulang Karena Cacat/Tidak Benar (Proboyo, 1998).
- 5) Proses dan Tata Cara Evaluasi Kemajuan/Pelaporan Pekerjaan yang Lama (Proboyo, 1998).

Aspek Force Majeure

Aspek *Force Majeure* akan ditinjau berdasarkan:

- 1) Terjadinya Hal-hal Tak Terduga Akibat Bencana Alam.
- 2) Adanya Huru-Hara/ Kerusakan atau Perang
- 3) Kerusakan/Pengerusakan akibat kelalaian atau Perbuatan Pihak Ketiga
- 4) Perubahan Situasi atau kebijaksanaan Politik/Ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Skala Pengukuran Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang sesuai dengan keperluan dalam penelitian ini, khusus untuk data kualitatif supaya dapat dikuantitatifkan maka perlu menggunakan skala pengukuran.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian pengaruh menentukan yaitu *Skala Likert* dengan empat angka yaitu :

Kode 1 : Sangat Tidak Menentukan (STM)

Kode 2 : Tidak Menentukan (TM)

Kode 3 : Menentukan (M)

Kode 4 : Sangat Menentukan (SM)

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui intensitas terjadi adalah *Skala Likert* dengan tiga angka yaitu :

Kode 1 : Tidak Pernah Terjadi (TPT)

Kode 2 : Pernah Terjadi (PT)

Kode 3 : Sering Terjadi (ST)

Formasi pernyataan dalam kuesioner tersebut terdiri dari 6 aspek yaitu :

1. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan
2. Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan
3. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
4. Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
5. Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
6. Aspek *Force Majeure*

Untuk responden pelaksana pekerjaan seluruhnya ada 19 jenis penyebab sedangkan responden pemilik pekerjaan seluruhnya juga ada 19 jenis penyebab.

Jumlah Responden

Tiga jenis responden dalam penelitian ini yakni pemberi pekerjaan/pemerintah (pemilik), pelaksana pekerjaan/masyarakat langsung/KSM dan pihak pelaksana pengawas pekerjaan/koodinator pekerjaan yakni dari BKM. Untuk responden KSM dan BKM, dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Populasi Pekerjaan Fisik PNPM Mandiri KotaAmbon Yang Mengalami Keterlambatan

No.	Kecamatan	Jumlah Pekerjaan Yang Terlambat
1.	Nusaniwe	32
2.	Sirimau	41
3.	Teluk Ambon	52
4.	TA Baguala	34
5.	Leitimur Selatan	42
	TOTAL	201

(Sumber : Laporan Hasil Audit Pekerjaan Fisik PNPM Mandiri Kota Ambon Tahun 2012)

Jumlah sampel yang diambil/diteliti adalah sebesar 15% dari populasi yang ada (Arikunto, 1993 dan Surakhmad, 2004) yakni :

$$\frac{15}{100} \times 201 = 30,15 \approx 30 \text{ sampel}$$

Maka jumlah sampel untuk penelitian ini pada pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon yang terlambat adalah sebanyak 30 sampel pekerjaan. Sehingga total responden untuk KSM dan BKM adalah sebanyak 60 responden.

Selanjutnya digunakan rumus *Proportional Stratified Random Sampling* dan diperoleh :

$$Kec. Nusaniwe = \frac{32}{201} \times 30 = 4,7 \approx 5 \text{ sampel} = 10 \text{ responden}$$

$$\text{Kec. Sirimau} = \frac{41}{201} \times 30 = 6,11 \approx 6 \text{ sampel} = 12 \text{ responden}$$

$$\text{Kec. Teluk Ambon} = \frac{52}{201} \times 30 = 7,76 \approx 8 \text{ sampel} = 16 \text{ responden}$$

$$\text{Kec. Ta Baguala} = \frac{34}{201} \times 30 = 5,07 \approx 5 \text{ sampel} = 10 \text{ responden}$$

$$\text{Kec. Leitimur Selatan} = \frac{42}{201} \times 30 = 6,26 \approx 6 \text{ sampel} = 12 \text{ responden}$$

Sedangkan untuk responden dari pemberi/pemilik pekerjaan adalah seluruh pegawai/staf yang terlibat dalam menangani pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon yakni dari bagian Sosial Ekonomi Bappeko Kota Ambon.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemilik/pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan langsung di lapangan yang berkedudukan di Kota Ambon. Lokasi proyek yang dikerjakan tidak dibatasi dimana masih dalam cakupan PNPM Mandiri Kota Ambon di 5 kecamatan yang ada.

Variabel Penelitian

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah keterlambatan pekerjaan fisik.
2. Variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2008). Variabel bebas yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen terdiri dari:
 - a. Variabel pertama (X_1) adalah Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan.
 - b. Variabel kedua (X_2) adalah Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan.
 - c. Variabel ketiga (X_3) adalah Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi.
 - d. Variabel keempat (X_4) adalah Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya.
 - e. Variabel kelima (X_5) adalah Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan.
 - f. Variabel keenam (X_6) adalah Aspek *Force Majeure*.

Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang dimaksudkan adalah pengumpulan data hasil investigasi lapangan yang berasal dari jawaban masukan balik kuesioner dengan cara in deep interview yang telah diedarkan kepada responden dan data lapangan dari dokumentasi pendukung/sekunder. Data yang terkumpul dari para

responden melalui kuesioner dengan cara *in deep interview* disini adalah tanggapan penegasan setuju atau tidak setujunya responden terhadap pernyataan yang ada sebagai penentu sebab-sebab keterlambatan. Sedangkan untuk data sekunder adalah data-data yang dimiliki oleh setiap pekerjaan yang menjadi sampel pada PNPM Mandiri, antara lain :

- Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Rrencana anggaran biaya (RAB)
- Dokumen kontrak
- Spesifikasi
- Proposal pekerjaan
- Laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan, akhir)/LPJ

Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan faktor-faktor menentukan dan tingkat intensitas terjadinya penyebab keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri di Kota Ambon, serta hasil klasifikasi dan peringkat dari penyebab-penyebab keterlambatan tersebut berdasarkan pengaruh menentukan dan tingkat intensitas terjadinya.

Analisis Tingkat Kesetujuan

Kuesioner dengan cara *in deep interview* yang telah diisi oleh para responden berdasarkan nomor kode nilai ketidaksetujuan atau kesetujuannya, diklasifikasikan dengan memberikan bobot pada masing-masing nomor kode penilaian tersebut. Kode penilaian diberikan kepada penilaian menentukan dan penilaian intensitas terjadinya faktor-faktor penyebab keterlambatan. Masing-masing pernyataan diberi skor berdasarkan penilaian dari responden terhadap masing-masing variabel.

Instrumen pengukuran **penilaian menentukan** dengan menggunakan skala Likert, skor 1 (sangat tidak menentukan) sampai dengan 4 (sangat menentukan). Jika skor total responden tinggi, menggambarkan faktor penyebab menentukan keterlambatan dan sebaliknya jika total skor responden rendah menggambarkan faktor penyebab tidak menentukan keterlambatan.

Instrumen pengukuran **penilaian intensitas** terjadi dengan menggunakan skala Likert, skor 1 (tidak pernah terjadi) sampai dengan 3 (sering terjadi). Jika skor total responden tinggi, menggambarkan faktor penyebab sering menyebabkan keterlambatan dan sebaliknya jika total skor responden rendah menggambarkan faktor penyebab tidak menyebabkan keterlambatan.

Tingkat kesetujuan diperhitungkan terhadap skor tertinggi untuk mengetahui tingkat pengaruh “sangat rendah” sampai “sangat tinggi” dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Rerata} = \frac{\text{Frekwensi} \times \text{Bobot}}{\text{Total Frekwensi}}$$

$$\text{Tingkat kesetujuan} = \frac{\text{Nilai Rerata}}{\text{Skor Max Var}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tingkat kesetujuan pada setiap penyebab terjadinya keterlambatan, selanjutnya dapat diurutkan dalam ranking dari faktor yang paling menentukan dan paling sering terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Dari 60 sampel penelitian yang terdiri dari 30 responden dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan 30 responden dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada pelaksanaan pekerjaan fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Ambon, dengan penyebaran kuisioner dengan metode wawancara/*in deep interview*, keseluruhan responden bersedia menjawab seluruh poin isian kuisioner yang ada.

Sedangkan untuk responden yang berasal dari pihak pemilik pekerjaan juga bersedia menjawab seluruh poin isian kuisioner yang ada dimana sebanyak 7 (tujuh) responden pegawai/staf dari Bidang Sosial Ekonomi Bappeko Kota Ambon.

Uji Instrumen

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam, sosial ataupun sesuatu yang ingin peneliti ketahui. Instrumen yang telah tersedia harus diuji validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas

Sugiyono (2006) menyatakan bahwa suatu item dinyatakan valid jika indeks korelasi *product moment pearson* ($r \geq 0,3$ atau probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,01 (1%) dan 0,05 (5%). Hasil uji validitas kuisioner BKM, KSM dan Pemilik untuk faktor pengaruh menentukan dengan Program SPSS (2-tailed) dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Responden BKM

Variabel	Indikator	Uji Validitas Skala Intensitas			Uji Validitas Skala Menentukan		
		Korelasi	Probabilitas Korelasi	Status	Korelasi	Probabilitas Korelasi	Status
Aspek Perencanaan dan Penilaian Pekerjaan (X1)	X1	1.000		Valid	1.000		Valid
	X1.1	0.743	0.000	Valid	0.643	0.004	Valid
	X1.2	0.722	0.000	Valid	0.505	0.004	Valid
	X1.3	0.323	0.041	Valid	0.529	0.003	Valid
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (X2)	X2	1.000		Valid	1.000		Valid
	X2.1	0.555	0.000	Valid	0.514	0.000	Valid
	X2.2	0.740	0.000	Valid	0.666	0.000	Valid
Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X3)	X3	1.000		Valid	1.000		Valid
	X3.1	0.801	0.000	Valid	0.920	0.000	Valid
	X3.2	0.910	0.000	Valid	0.870	0.000	Valid
Aspek Kesiapan Penyajian Sumber Daya (X4)	X4	1.000		Valid	1.000		Valid
	X4.1	0.729	0.000	Valid	0.659	0.000	Valid
	X4.2	0.504	0.005	Valid	0.514	0.004	Valid
	X4.3	0.527	0.038	Valid	0.455	0.012	Valid
	X4.4	0.382	0.049	Valid	0.382	0.037	Valid
	X4.5	0.448	0.013	Valid	0.504	0.005	Valid
Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5)	X5	1.000		Valid	1.000		Valid
	X5.1	0.679	0.000	Valid	0.787	0.000	Valid
	X5.2	0.548	0.029	Valid	0.529	0.003	Valid
	X5.3	0.688	0.000	Valid	0.706	0.000	Valid
Aspek Force Majeure (X6)	X6	1.000		Valid	1.000		Valid
	X6.1	0.946	0.000	Valid	0.923	0.000	Valid
	X6.2	0.187	0.322	Tidak Valid	0.450	0.013	Valid
	X6.3	0.431	0.017	Valid	0.450	0.013	Valid

(Sumber: Hasil Analisis)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Responden KSM

Variabel	Indikator	Uji Validitas Skala Intensitas			Uji Validitas Skala Menentukan		
		Korelasi	Probabilitas Korelasi	Status	Korelasi	Probabilitas Korelasi	Status
Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan (X1)	X1.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X1.1.	0.672	0.000	Valid	0.499	0.005	Valid
	X1.2.	0.780	0.000	Valid	0.456	0.011	Valid
	X1.3.	0.580	0.038	Valid	0.700	0.000	Valid
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (X2)	X2.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X2.1.	0.884	0.000	Valid	0.878	0.000	Valid
	X2.2.	0.788	0.000	Valid	0.733	0.000	Valid
Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X3)	X3.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X3.1.	0.731	0.000	Valid	0.876	0.000	Valid
	X3.2.	0.876	0.000	Valid	0.732	0.000	Valid
Aspek Kesiapan Penyediaan Sumber Daya (X4)	X4.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X4.1.	0.590	0.001	Valid	0.688	0.000	Valid
	X4.2.	0.497	0.005	Valid	0.548	0.002	Valid
	X4.3.	0.410	0.024	Valid	0.302	0.048	Valid
	X4.4.	0.358	0.048	Valid	0.400	0.038	Valid
	X4.5.	0.587	0.001	Valid	0.657	0.001	Valid
	X4.6.	0.472	0.009	Valid	0.596	0.001	Valid
Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5)	X5.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X5.1.	0.678	0.000	Valid	0.803	0.000	Valid
	X5.2.	0.456	0.011	Valid	0.310	0.035	Valid
	X5.3.	0.653	0.002	Valid	0.658	0.001	Valid
Aspek Force Majeure (X6)	X6.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X6.1.	0.942	0.000	Valid	0.902	0.000	Valid
	X6.2.	0.211	0.283	Tidak Valid	0.322	0.043	Valid
	X6.3.	0.484	0.010	Valid	0.322	0.043	Valid

(Sumber: Hasil Analisis)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Responden Pemilik

Variabel	Indikator	Uji Validitas Skala Intensitas			Uji Validitas Skala Menentukan		
		Korelasi	Probabilitas Korelasi	Status	Korelasi	Probabilitas Korelasi	Status
Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan (X1)	X1.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X1.a.	0.789	0.005	Valid	0.645	0.017	Valid
	X1.b.	0.748	0.048	Valid	0.750	0.042	Valid
	X1.c.	0.748	0.048	Valid	0.885	0.018	Valid
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (X2)	X2.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X2.a.	0.730	0.042	Valid	0.938	0.002	Valid
	X2.b.	0.849	0.016	Valid	0.710	0.044	Valid
Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X3)	X3.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X3.a.	0.730	0.042	Valid	0.891	0.007	Valid
	X3.b.	0.849	0.016	Valid	0.548	0.033	Valid
Aspek Kesiapan Penyediaan Sumber Daya (X4)	X4.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X4.a.	0.392	0.044	Valid	0.540	0.036	Valid
	X4.b.	0.973	0.000	Valid	0.687	0.048	Valid
	X4.c.	0.973	0.000	Valid	0.881	0.009	Valid
	X4.d.	0.330	0.039	Valid	0.335	0.035	Valid
	X4.e.	0.973	0.000	Valid	0.524	0.003	Valid
X4.f.	0.588	0.041	Valid	0.153	0.744	Tidak Valid	
Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5)	X5.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X5.a.	0.730	0.042	Valid	0.633	0.027	Valid
	X5.b.	0.887	0.011	Valid	0.872	0.010	Valid
	X5.c.	0.788	0.048	Valid	0.881	0.013	Valid
Aspek Force Majeure (X6)	X6.	1.000		Valid	1.000		Valid
	X6.a.	0.683	0.021	Valid	0.587	0.048	Valid
	X6.b.	0.882	0.009	Valid	0.784	0.038	Valid
	X6.c.	0.882	0.009	Valid	0.784	0.038	Valid

(Sumber: Hasil Analisis)

Uji Reliabilitas

Rangkuman hasil uji reliabilitas kuesioner BKM, KSM dan pemilik pekerjaan untuk faktor intensitas terjadi dan pengaruh menentukan dengan Program SPSS dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Faktor Intensitas Terjadi

Variabel	Alpha Cronbach (α)					
	BKM	Keputusan	KSM	Keputusan	Pemilik	Keputusan
Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan (X1)	0,705	Reliabilitas Ditema	0,703	Reliabilitas Ditema	0,808	Reliabilitas Baik
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (X2)	0,781	Reliabilitas Ditema	0,855	Reliabilitas Baik	0,825	Reliabilitas Baik
Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X3)	0,888	Reliabilitas Baik	0,835	Reliabilitas Baik	0,825	Reliabilitas Baik
Aspek Kesiapan Penyediaan Sumber Daya (X4)	0,683	Reliabilitas Ditema	0,654	Reliabilitas Ditema	0,753	Reliabilitas Ditema
Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5)	0,673	Reliabilitas Ditema	0,681	Reliabilitas Ditema	0,819	Reliabilitas Baik
Aspek Force Majeure (X6)	0,691	Reliabilitas Ditema	0,698	Reliabilitas Ditema	0,825	Reliabilitas Baik

(Sumber: Hasil Analisis)

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Faktor Pengaruh Menentukan

Variabel	Alpha Cronbach (α)					
	BKM	Keputusan	KSM	Keputusan	Pemilik	Keputusan
Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan (X1)	0,639	Reliabilitas Ditema	0,639	Reliabilitas Ditema	0,722	Reliabilitas Ditema
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (X2)	0,786	Reliabilitas Ditema	0,837	Reliabilitas Baik	0,644	Reliabilitas Baik
Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X3)	0,689	Reliabilitas Baik	0,635	Reliabilitas Baik	0,781	Reliabilitas Ditema
Aspek Kesiapan Penyediaan Sumber Daya (X4)	0,660	Reliabilitas Ditema	0,675	Reliabilitas Ditema	0,763	Reliabilitas Ditema
Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5)	0,781	Reliabilitas Ditema	0,683	Reliabilitas Ditema	0,800	Reliabilitas Baik
Aspek Force Majeure (X6)	0,730	Reliabilitas Ditema	0,673	Reliabilitas Ditema	0,667	Reliabilitas Ditema

(Sumber: Hasil Analisis)

Analisis Data

Analisis Data Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Fisik PNPM Mandiri

Tabulasi penyebab terjadinya keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri dicari besarnya nilai rerata dan tingkat kesetujuan. Penilaian skor jawaban kuesioner yang digunakan yakni skala ordinal dengan hasil menjadi empat kategori. Kisaran dari tingkat kesetujuan adalah 25% - 100% dari skor maksimum, kriteria dari skala menentukan dan skala intensitas selanjutnya adalah sebagai berikut :

25,00% - 43,75% = sangat rendah

43,76% - 62,50% = rendah

62,51% - 81,25% = tinggi

81,26% - 100% = sangat tinggi

Contoh perhitungan nilai rerata dan tingkat kesetujuan untuk Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan (X1) sub variabel Jenis pekerjaan yang tidak direncanakan, namun terjadi/dilakukan di lapangan (X1.1) dengan Responden BKM Skala Intensitas yaitu :

$$\text{Nilai X Rerata} = \frac{\text{Frekwensi} \times \text{Bobot}}{\text{Total Frekwensi}}$$

$$= \frac{(11 \times 1) + (17 \times 2) + (2 \times 3)}{30} = 1,7$$

$$\text{Tingkat kesetujuan} = \frac{\text{Nilai Rerata}}{\text{Skor Maksimum Variabel}} \times 100\%$$

$$= 56,66 \sim 57 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sub jenis pekerjaan yang tidak direncanakan, namun terjadi/dilakukan di lapangan (X1.1) dari Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan (X1) menurut responden BKM termasuk tingkat intensitasnya adalah rendah.

Dari hasil analisa yang dilakukan berdasarkan kuisisioner responden BKM dan KSM diketahui bahwa untuk tingkat kesetujuan jawaban responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan adalah pelaporan pekerjaan/LPJ yang lambat dan tidak lengkap/salah sehingga tidak efektif waktu (X5.2), sedangkan yang berpengaruh berikutnya berturut-turut adalah rencana waktu pengerjaan yang tidak sesuai/tidak tepat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (X1.2) dan terjadinya hal-hal tidak terduga akibat bencana alam (X6.1).

Sedangkan dari hasil analisa yang dilakukan berdasarkan kuisisioner responden pemilik pekerjaan diketahui bahwa untuk tingkat kesetujuan jawaban responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan adalah pelaporan pekerjaan/LPJ yang lambat dan tidak lengkap/salah sehingga tidak efektif waktu (X5.c), kemudian yang berpengaruh berikutnya dari skala intensitas adalah terjadinya hal-hal tidak terduga akibat bencana alam (X6.a) dan rencana waktu pengerjaan yang tidak sesuai/tidak tepat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (X1.b) merupakan rangking ke 2. Kemudian perubahan lingkup pekerjaan/adanya pekerjaan tambah kurang (X2.b), pengantaran/dropping bahan-bahan material yang sulit karena lokasinya yang sukar dijangkau (X4.a) dan lambatnya kerja KSM dan BKM dalam persiapan (administrasi, sumber daya, dll) pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan (X5.a) merupakan rangking ke 3. Dari skala menentukan yang berpengaruh berikutnya adalah rencana waktu pengerjaan yang tidak sesuai/tidak tepat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (X1.b) dan lambatnya kerja KSM dan BKM dalam persiapan (administrasi, sumber daya, dll) pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan (X5.a) merupakan rangking ke 2 dan terjadinya hal-hal tidak terduga akibat bencana alam (X6.a) merupakan rangking ke 3.

Tabel 7. Hasil perhitungan kesetujuan Responden untuk Variabel X5.1

Responden	Tingkat Kesetujuan		Keterangan
	Skala Intensitas (%)	Skala Menentukan (%)	
BKM	93	96	Paling tinggi
KSM	97	98	Paling tinggi
Pemilik	95	96	Paling tinggi

Sumber : hasil analisa

KESIMPULAN

1. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri di Kota berdasarkan kuisisioner responden BKM dan KSM adalah pelaporan pekerjaan/LPJ yang lambat dan tidak lengkap/salah, sehingga tidak efektif waktu dari variabel X5 (Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan).
2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri di Kota berdasarkan kuisisioner responden pemilik pekerjaan adalah pelaporan pekerjaan/LPJ yang lambat dan tidak lengkap/salah, sehingga tidak efektif waktu dari variabel X5 (Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan).
3. Prosentasi nilai kesetujuan skala intensitas adalah (BKM 93%; KSM 97%; Pemilik 95%).

4. Prosentasi nilai kesetujuan skala menentukan adalah (BKM 96%; KSM 98%; Pemilik 96%)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Metode Research*. Rajawali Press. Jakarta.
- Proboyo, Budiman. 1998. *Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-penyebabnya*. Program Pascasarjana Studi Manajemen Konstruksi Universitas Kristen Petra Surabaya. Surabaya.
- Saleh, Nursyam. 2005. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Klaim dan Penyelesaiannya Pada Industri Konstruksi*. Faculty of Civil Engineering University Teknologi Malaysia.
- Soeharto, Iman. 1997. *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Wijayanthi, Shanty. 2005. *Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pembangunan Proyek Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri*. Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Surabaya.
- , Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- , Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nomor 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.